

STUDI KASUS PERGULATAN PEREMPUAN SELAKU LEGISLATOR ACEH DI PANGGUNG POLITIK PASCA ORDE BARU

A Case Study of Women's Control as Aceh Legislators on the Post-New Orde Political Stage

¹⁾ Ainol Mardhiah, ²⁾ Dadang Rahmat Hidayat, ³⁾ Agus Rahmat, ⁴⁾ Nuryah Asri Sjafirah

¹⁾ Malikussaleh University, Indonesia
^{2,3,4)} Padjadara University, Indonesia

¹⁾ Tengku Nie, Cot Rd, Reuleut Tim., Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia
^{2,3,4)} Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kab. Sumedang, Indonesia

Diterima 2020-02-16 / Disetujui 2021-03-31

ABSTRACT

For women to become a legislator, it is not an option that appears suddenly, everything is through a mature thought process, a strong desire from within, has good communication competence, full support from family and the voting community, because cultural and structural barriers become obstacles women are present in the public sphere, so it requires strong motivation from within women legislative candidates to fill this space. Strong Motivation for women legislator candidates to choose to become people's representatives. The theory symbolic interaction used in this research. Uses a qualitative method with a case study approach. This study aims to outlines the motivation of Acehnese women to be present in the public sphere by becoming legislators in the Aceh local parliament. The results of the study concluded that: 1). Two motivations that encourage Acehnese women to be present in the political space by becoming legislative members in the Aceh parliament, namely internal motivation and external motivation. 2) the internal motivation is a sense of empathy, awareness of Acehnese women of the importance of their presence in politics and previous organizational experiences. 3). The external motivation is; family motivation, social motivation, religious motivation, political motivation and economic motivation. The involvement of Aceh women by becoming legislators is a form of exploration, development and self-actualization of themselves in the public sphere.

Keywords: *Communication, motivation, women Legislative members, Aceh Parleament*

ABSTRAK

Bagi perempuan menjadi seorang legislator, bukanlah pilihan yang muncul secara tiba-tiba, semuanya melalui proses pemikiran yang matang, keinginan yang cukup kuat dari dalam diri, memiliki kompetensi komunikasi yang baik, dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat pemilih, karena hambatan kultural dan structural menjadi kendala bagi perempuan hadir dalam ruang publik, sehingga membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri calon legislator perempuan untuk mengisi ruang ini. Motivasi dari luar dirinya juga menjadi kekuatan bagi calon legislator perempuan memilih menjadi wakil rakyat. Teori Interaksi simbolik digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan Studi Kasus, kajian ini bermaksud untuk menguraikan motivasi perempuan Aceh hadir di ruang publik dengan menjadi legislator di parlemen lokal Aceh. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: 1). Ada dua motivasi yang mendorong perempuan Aceh untuk hadir dalam ruang politik dengan menjadi anggota legislatif dalam parlemen Aceh, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. 2) motivasi internal itu adalah rasa empati, kesadaran perempuan Aceh akan pentingnya kehadiran mereka dalam politik dan pengalaman organisasi yang digeluti sebelumnya. 3). Motivasi eksternal itu adalah; motivasi keluarga, motivasi sosial, motivasi agama, motivasi politik dan motivasi ekonomi. Keterlibatan perempuan Aceh

dengan menjadi legislator merupakan bentuk eksplorasi, pengembangan dan aktualisasi diri mereka di ruang publik.

Kata Kunci : *Komunikasi, motivasi, anggota legislatif perempuan, parlemen Aceh*

*Corresponding Author:

Email : inol_mardhiah@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Hasrat menjadi politisi dan terjun dalam dunia politik tidaklah muncul pada semua orang di dunia ini, hanya segelintir orang yang senang dan tertarik untuk hadir dalam dunia publik dan menjadi politikus, namun bagi sebagian yang lain memiliki ketertarikan yang berbeda dan dengan bidang yang berbeda pula.

Stigma bahwa politik dianggap sebagai dunianya laki-laki bukan dunia perempuan. politik selalu dianggap dengan dunia laki-laki, politik itu kotor, dan tidak wajar perempuan hadir di sana, karena bagi kelompok feminis, politik selalu berkait dengan kekuasaan, kesewenang-wenangan, pengerahan massa dan ini bukan menjadi karakter perempuan. bahwa dunia politik diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. (Mikail, 2015).

Perempuan tidak pantas hadir dalam ruang politik, karena perempuan tidak mampu berpikir rasional, tidak mau menanggung resiko dan perempuan hanya sebagai “penghuni” dapur/domestik, dan stereotipe ini melekat pada perempuan. Akibatnya menjadi sebuah pandangan di dalam masyarakat umum bahwa dunia publik sebagai dunianya laki-laki dan dunia domestik itu tempatnya perempuan

Undang-undang memberikan ruang begitu lebar pada perempuan untuk hadir di ruang publik (menjadi legislator), sebagaimana Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, mengenai hak khusus bagi perempuan di bidang politik dengan sistem *affirmative action*..

Aturan ini sangat menguntungkan bagi perempuan di Indonesia, sama halnya bagi perempuan Aceh, hadirnya kebijakan ini, dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan, karena sudah dilegalkan oleh pemerintah, yaitu minimal 30 persen bagi

setiap partai politik dalam mengajukan calon anggota legislatif perempuan.

Ini menjadi langkah yang strategis bagi perempuan untuk mengupayakan kehadiran dan partisipasi politiknya, menjadi kesempatan yang substantif, bukan hanya sekedar formalitas untuk mencapai kuota yang ada.

Aceh Propinsi di Sumatera yang letaknya paling ujung di wilayah barat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2017, Jumlah penduduk propinsi ini secara keseluruhan, berjumlah 5.281.314 jiwa, terdiri dari 2.597.326 perempuan dan 2.592.140 laki-laki.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif tahun 2014 di propinsi Aceh, ada 12 (dua belas) orang anggota legislatif perempuan yang terpilih dari 81 kursi yang tersedia, atau berkisar 14.8% legislator perempuan hadir dalam parlemen tingkat propinsi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Angka legislator perempuan yang terpilih di atas belum menunjukkan jumlah anggota legislatif perempuan yang signifikan yang sesuai dengan *Affirmative Action* dan belum mencerminkan kehadiran perempuan Aceh secara penuh dalam ruang politik sebagai legislator.

Minimnya kehadiran perempuan dalam parlemen Aceh dimungkinkan terjadi karena berbagai alasan, dimungkinkan kurangnya minat atau motivasi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai legislator atau juga karena tingkat kepercayaan pemilih terhadap calon anggota legislatif perempuan atau dimungkinkan juga karena kurangnya dukungan penuh yang diberikan oleh partai politik pengusung calon legislatif perempuan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan minimnya kehadiran perempuan dalam ruang publik, diantaranya penelitian oleh (Mikail, 2015) mengatakan secara umum, ada beberapa alasan membuat kurang terakomodirnya hak-hak politik kaum

perempuan, yaitu: kaum laki-laki selalu mendominasi Partai politik, dan adanya Stigma bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap.

Kemudian penelitian oleh (Hasni, 2015) menegaskan masyarakat Indonesia banyak memegang ideologi patriarki, sehingga melahirkan sebuah keputusan yang bias gender. Hal ini menjadi beratnya perjuangan perempuan dalam mencapai suatu kedudukan, ditambah adanya pemaknaan akan hukum agama yang memperkuat keadaan bias gender”.

Ditambah dengan hasil penelitian yang dilakukan (Devi, 2015) menyebutkan bahwa faktor ideologis serta faktor psikologis, paham patriarki; kurangnya rasa percaya diri, minimnya pengalaman, kapasitas dan kompetensi mereka terkait dengan partai politik, stigma buruk tentang politik disamping peran media massa yang tidak menjadikan isu tentang representasi perempuan dalam politik sebagai isu yang seksi untuk disajikan membuat perempuan tidak berpartisipasi secara aktif dalam ruang politik.

Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi Simbolik. Inti Teori ini bahwa komunikasi dilakukan melalui pertukaran simbol-simbol yang diberi makna sebagai ciri dari aktifitas manusia. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang akan mampu dianalisis pada saat seseorang tersebut berkomunikasi dengan pihak yang lain.

Tiga pokok pemikiran George Herbert Mead mengenai interaksi simbolik: 1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia. 2) Pentingnya konsep diri 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat. Teori Interaksi simbolik terpusat pada kepentingan pembentukan makna bagi perilaku manusia. Teori interaksi simbolik tidak bisa melepaskan diri dari proses komunikasi, karena pada mulanya makna itu tidak ada artinya sama sekali, sampai kemudian manusia mengkonstruksi makna tersebut secara interpretatif melalui interaksi kemudian makna tersebut disepakati bersama. *Kedua*, Interaksi Simbolik terpusat pada pentingnya konsep diri (*self concept*), ada dua asumsi tambahan; 1). Konsep diri Individu berkembang karena adanya interaksi dengan pihak lain. 2) Konsep diri menjadi motif seseorang dalam berperilaku. *Ketiga*, teori Interaksi simbolik berkaitan dengan

kebebasan individu dan batasan sosial. Asumsinya adalah: 1). Proses budaya & sosial akan mempengaruhi orang dan kelompok; 2). Interaksi sosial merupakan hasil dari Struktur sosial (Siregar, 2016).

Teori Interaksi Simbolik menjadi pemandu dan memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang menjadi topik kajian penelitian ini. Motivasi itu muncul karena adanya proses komunikasi yang terjadi pada perempuan-perempuan Aceh yang kemudian membentuk atau mengembangkan konsep diri mereka dan dengan konsep diri tersebut memunculkan motif dari tindakan/prilaku mereka dan hal inipun tidak lepas dari pengaruh budaya dan sosial di Aceh, karenanya penulis menggunakan teori Interaksi simbolik sebagai landasan teori dalam kajian ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh (Madekhan, 2019) bahwa landasan teori sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai data lapangan dan mampu menjelaskan gambaran umum latar belakang penelitian dan menjadi dasar dalam analisis data penelitian.

Peneliti mencoba mendeskripsikan motivasi anggota legislatif perempuan Aceh hadir dalam ruang publik sebagai anggota legislatif. Motivasi itu hadir karena adanya komunikasi/interaksi yang terjadi pada anggota legislatif perempuan Aceh. Motivasi akan menjadi tuntunan bagi mereka dalam menjalankan aktifitas sebagai legislator. Tuntutan sebagai legislator mengharuskan wakil rakyat untuk membangun komunikasi politik yang baik dengan berbagai elemen yang berkepentingan dengannya, karenanya motivasi awal mereka sebagai legislator akan mempengaruhi dalam prilaku komunikasi mereka sebagai wakil rakyat.

Tugas sebagai anggota legislatif mengharuskan perempuan-perempuan ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak lain, yaitu dengan sesama anggota legislatif di dalam parlemen, dengan stakeholder dan konstituen didapilnya masing-masing, maka proses komunikasi politik yang terjadi di dalamnya.

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang diarahkan untuk tercapainya sebuah tujuan, sebagai penghubung pemikiran-pemikiran politik di tengah masyarakat. Komunikasi politik upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan melalui

penyampaian pendapat, sikap dan perilaku individu, institusi/lembaga, dan kekuatan politik (Putri, 2015).

Singkatnya bahwa komunikasi politik sebagai pengiriman pesan dan informasi bercirikan politik yang dilakukan komunikator politik (pada level suprastruktur dan infrastruktur), untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik dalam bentuk simbol verbal maupun nonverbal.

Legislator sebagai aktor politik berada pada level suprastruktur, pencalonan mereka sebagai anggota legislatif, tidak terlepas dari konsep diri mereka, karena motivasi seorang untuk memilih sesuatu hal tidak terlepas dari konsep diri yang ada pada dirinya. Begitu halnya juga ketika seseorang memilih untuk hadir dalam ruang publik, konsep diri pada individu akan mendorong individu dalam berperilaku.

Konsep diri (*self concept*) didefinisikan dengan "*those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others*". Konsep diri sebagai penentu Ketika komunikasi kita dengan pihak lain terjadi (Riswandi, 2013).

Konsep diri merupakan gambaran diri dan perasaan tentang diri, pandangan ini bersifat psikologis, sosial dan fisis, menurut William D Brooks dalam (Rakhmat, 2015).

Selanjutnya (Widiarti, 2017) mengatakan bahwa konsep diri tentang gambaran bagaimana individu mengamati, mempersepsikan dan mengalami sesuatu hal. Konsep tentang diri hadir karena interaksi sosial dan menjadi pemandu dan sangat mempengaruhi pada tingkah laku seseorang.

Konsep diri sebagai kesadaran bathin yang permanen, berkait dengan pengalaman dan berkait dengan aku dan konsep diri akan membedakan aku dengan orang lain.

Konsep diri terbagi pada psikologis, sosial dan fisis. Konsep diri tidak hanya berkaitan dengan gambaran diri, namun juga penilaian tentang diri, sehingga konsep diri itu berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri anda. Setiap orang termasuk anggota legislative perempuan memiliki konsep dirinya masing-masing.

Menurut (Rakhmat, 2015) 2beberapa faktor yang berpengaruh pada konsep diri seseorang: a) orang lain; b) kelompok rujukan (*reference group*). 5 ciri seseorang memiliki

konsep diri positif: yakin bahwa setiap masalah akan mampu diselesaikan; memiliki pandangan bahwa dia sama dengan yang lain; menanggapi pujian dari orang lain dengan biasa saja; menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai emosi, hasrat dan sikap yang berbeda; kemampuan dalam melakukan perbaikan diri mengenai apa yang tidak disukai dan mencoba untuk melakukan koreksi akan hal tersebut. Konsep diri pada diri seseorang akan terus mengalami perubahan dan berkembang karena berbagai faktor.

Konsep diri terbentuk melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak yang lain, sehingga dengan adanya konsep diri pada caleg perempuan ini menjadi penuntun bagi mereka dalam bertindak dan berperilaku. Konsep diri merubah pola pikir dan persepsi mereka mengenai politik, dengan pengembangan pada konsep diri telah menggugah kesadaran perempuan untuk ikut terlibat secara aktif dalam ruang publik.

Keikutsertaan kaum perempuan dalam politik dan ruang publik, terkhusus di parlemen adalah urgent dan sangat beralasan untuk dilakukan; karena ini sebagai bentuk pemenuhan *affirmative action* sebesar 30% bagi keterwakilan perempuan dalam parlemen. Bentuk tanggung jawab perempuan dan kepekaan mereka akan isu-isu publik, terutama berkaitan dengan perempuan dan anak, kaum marjinal disamping juga berkaitan dengan moralitas dan lain-lain.

Alasan lainnya bahwa selama ini masyarakat memandang perbedaan yang sangat ketat laki-laki dan perempuan di dalam politik. Ditambah adanya stereotipe dan label negatif yang sangat memojokkan perempuan, yang berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan. Kalau dilihat secara formal memang tidak ada aturan yang mendiskreditkan perempuan dalam politik maupun dalam kehidupan publik lainnya, namun realitanya tergambar dengan jelas bahwa proporsi jumlah perempuan pada tingkat pengambilan keputusan di semua level sangatlah rendah.

Hal ini merefleksikan bahwa adanya hambatan dalam struktural dan kultural keterwakilan perempuan di ruang publik, karenanya harus dilakukan berbagai upaya, misalnya dengan cara peningkatan kesadaran politik pada perempuan, peningkatan kapasitas di kalangan perempuan, juga

pemberian kesempatan yang luas bagi perempuan dalam pengurus partai dan lingkungan pemerintah.

Keterwakilan perempuan di parlemen Aceh diperlukan dan menjadi penting, karena perempuan merupakan mayoritas dari masyarakat Aceh. Perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengisi pembangunan Aceh, sehingga keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah Aceh sangat diperlukan.

Kehadiran mereka sebagai legislator menjadi jembatan dari kepentingan perempuan di daerah Aceh, legislator perempuan yang akan memperjuangkan kepentingan (aspirasi) kaum perempuan, karena hanya legislator perempuan yang lebih memahami keinginan dari kaumnya.

Berdasarkan realitas yang dipaparkan, fokus penelitian mengenai bagaimana motivasi anggota legislatif perempuan Aceh untuk hadir dalam ruang publik. Karena sebagaimana dipaparkan dilatar belakang diatas, begitu banyak persoalan yang mengemuka yang terjadi dalam masyarakat Aceh, namun mereka tertarik untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat.

Penelitian ini dibatasi pada motivasi anggota legislatif perempuan yang terpilih sebagai legislator pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai motivasi dari anggota legislatif perempuan Aceh yang terpilih pada konstestasi pileg 2014-2019 untuk menjadi legislator.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman, masukan dan kontribusi kepada partai politik dan aktor-aktor politik dalam rangka merumuskan kebijakan, regulasi yang terkait dengan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari paradigma interpretif (konstruktivis). Interpretif mengkaji bahwa dasar untuk memahami makna sosial terletak pada fakta yang unik, memiliki konteks dan makna (Muslim, 2016).

Pendekatan konstruktif (interpretif) digunakan dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai motivasi perempuan Aceh tampil dalam ruang publik dengan menjadi anggota legislatif.

Studi kasus sebagai salah satu metode kajian dalam kualitatif, penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan realitas nyata, terbatas kontemporer atau banyak kasus yang dilakukan secara rinci dan mendalam. Studi kasus menghadirkan berbagai sumber informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lainnya (Creswell, 2014). Yin (Creswell, 2014) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan studi kasus tentang suatu kasus dalam realitas nyata, dalam konteks atau setting kontemporer.

Pendekatan kualitatif, dimana penelitiannya mengarah langsung pada setting serta individu (kelompok) masyarakat di mana individu dan kelompok itu berada. Secara menyeluruh, subjek penelitian kualitatif bisa meliputi organisasi, kelompok, individu, teks, atau artefak.

Penentuan Informan dilakukan secara *purposive sampling*. Subjek penelitian didasarkan pada orang yang dianggap paling mengerti dan mengetahui mengenai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, hal ini akan memberikan kemudahan peneliti dalam menelusuri data penelitian. Seluruh anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi di dalam parlemen Aceh untuk tingkat propinsi pada periode 2014-2019 sebagai informan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni data hasil penelitian lapangan, dilakukan pengolahan dan kemudian penarikan simpulan. Analisis data dilakukan dari tahap reduksi data yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, transformasi dari data lapangan. Kemudian, display data, penyajian data informasi. Terakhir pada tahap verifikasi dan penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori interaksi simbolik sebagai landasan teoritis dari penelitian ini, dengan harapan bahwa teori ini akan mampu menguraikan mengenai motivasi anggota

legislatif perempuan untuk hadir di ruang publik dengan menjadi legislator perempuan dalam parlemen Aceh pada periode 2014-2019.

Dewan perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk tingkat propinsi Aceh. Pada periode 2014-2019, sebanyak 81 kursi parlemen yang diperebutkan oleh calon anggota legislatif. Persaingan terjadi dikalangan calon legislatif untuk menarik simpatik dari pemilih (konstituen).

Dalam periode 2014-2019 ini terdapat 12 anggota legislatif perempuan yang menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Terdiri dari; 5 orang legislator perempuan dari Partai Aceh (Partai lokal) dan 7 orang Partai Nasional; yaitu; 3 dari Partai Golkar, 2 orang dari PAN dan masing-masing 1 orang legislator perempuan dari partai PPP, Nasdem, Gerindra.

Bagi kedua belas anggota legislatif perempuan Aceh di DPRA menjadi anggota dewan atau wakil rakyat memiliki motivasi (niat, dorongan) yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagai wakil rakyat, mereka memiliki idealisme masing-masing yang mengarahkan dirinya untuk masuk dalam dunia politik. motivasi itu biasanya sesuatu yang terpendam

Keikutsertaan perempuan sebagai calon legislatif dipastikan memiliki motivasi tersendiri yang mendorong mereka untuk mengikuti kontestasi ini. Meskipun sistem sosial, budaya dan politik tidak berpihak sepenuhnya kepada perempuan yang hendak tampil dalam parlemen. Masih kuatnya ideologi patriarki misalnya. Rakozy mengatakan bahwa di negara Indonesia budaya patriarki menjadi salah satu ideologi yang masih sangat mewarnai dalam perilaku hidup dalam struktur masyarakat di Indonesia, konsep patriarki menjadi landasan ideologis. Dalam paham Patriarki posisi perempuan lebih rendah dari kedudukan laki-laki dalam sosial, budaya dan ekonomi (Novarisa, 2019).

Tampilnya perempuan dalam politik, sebagai suatu pilihan berdasarkan pada pertimbangan yang ada pada dirinya karena interaksi yang mereka lakukan, juga berdasarkan pada konsep dirinya, bagaimana yang bersangkutan memandang dirinya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut

sehingga melahirkan sebuah keputusan untuk menentukan pilihannya.

Untuk melihat aktifitas komunikasi politik anggota legislatif perempuan terlebih dahulu kita harus menemukan dorongan dan motivasi yang membuat mereka untuk ikut dalam kontestasi dan menjadi wakil rakyat.

Motivasi menurut Smith dalam (Indah Mariani & Sariyathi, 2017) mengatakan motivasi menjadi kekuatan yang mendorong serta mengarahkan individu dalam bertindak dan berperilaku dalam melakukan sesuatu tanpa tekanan atau manipulasi.

Mc. Clelland (Hidayati et al., 2016) mengutarakan bahwa motivasi sebagai kekuatan yang ada yang akan berkembang dan ini sangat bergantung pada dorongan pada kebutuhan, situasi individu serta peluang yang ada. Mc. Clelland menyebutkan ada tiga bentuk motivasi yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. *Need for power* yaitu kebutuhan untuk mempersuasi serta mengontrol seseorang, sehingga orang tersebut mengikuti apa yang disampaikan dengan senang hati, tidak terpaksa. mengendalikan orang lain sehingga orang *Need for affiliation* yaitu kebutuhan dalam menjaga sekaligus merawat hubungan antarpersonal dengan yang lain. *Need for achievement* merupakan sebuah kebutuhan dalam meraih tujuan yang diinginkan. Faktor dalam diri seseorang seperti; pendidikan, pengalaman, kepribadian, sikap, cita-cita, keinginan. Faktor luar diri, dapat muncul karena berbagai hal, karena keluarga misalnya, pimpinan, teman atau karena pengaruh lainnya, namun faktor intrinsik dan ekstrinsik dari motivasi itu dapat hadir karena adanya stimulus”.

Data hasil lapangan diperoleh bahwa motivasi legislator untuk tampil dalam ruang publik sebagai anggota legislator disebabkan oleh dua hal, yaitu karena dorongan dari dirinya sendiri (internal) dan dorongan dari luar (eksternal).

Motivasi dari dalam dirinya itu muncul karena adanya proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Aceh dengan lingkungan sekitarnya yang kemudian memunculkan rasa empati yang ada pada diri mereka terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Empati merupakan sikap bagaimana seorang individu memahami perasaan orang lain namun

mereka tidak mengalaminya sendiri (Silfiasari, 2018). Empati yang dirasakan oleh perempuan-perempuan telah membuat mereka ikut dalam kontestasi pileg Aceh, empati akan pada masalah-masalah perempuan yang tidak pernah tuntasnya (korban kekerasan rumah tangga, seksual misalnya), masalah anak-anak dan kaum marjinal.

Legislator perempuan Aceh melihat bahwa selama ini perempuan, anak-anak dan kaum marjinal dikonotasikan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Hadirnya mereka sebagai perwakilan kaum perempuan akan mengangkat harkat dan martabat mereka. Peran mereka sebagai wakil dari golongan perempuan di dalam legislatif akan mengkomunikasikan fakta dan realitas tersebut di parlemen dan akan menyuarakan suara dari kelompok yang tidak berdaya ini, harapannya akan menelorkan sebuah kebijakan dan keputusan yang pro pada perempuan, anak-anak dan kaum marjinal, akhirnya mereka akan berdaya dan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Data penelitian juga membunyikan bahwa timbulnya rasa empati yang tinggi pada diri anggota legislatif perempuan terhadap persoalan-persoalan yang dirasakan perempuan yang terjadi di sekeliling mereka dan Aceh secara keseluruhan.

Timbulnya rasa empati pada diri anggota legislatif perempuan terhadap persoalan-persoalan yang dirasakan oleh perempuan yang terjadi di sekeliling mereka dan Aceh secara keseluruhan. inilah yang kemudian menghantarkan mereka untuk mengikuti pencalonan diri sebagai anggota legislatif. Munculnya motivasi yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena begitu banyak permasalahan sosial yang terjadi, seperti maraknya pemakaian narkoba di kalangan anak muda Aceh, kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, kemiskinan penduduknya yang masih sangat tinggi, lapangan kerja yang masih terbatas, kriminalitas yang semakin tinggi, persoalan-persoalan ini menimbulkan empati bagi informan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Disamping karena rasa empati, juga karena kesadaran dari mereka sendiri bahwa kehadiran anggota legislatif perempuan di perlemen itu suatu hal yang penting, perempuan harus menjadi bagian dari lahirnya sebuah keputusan, apalagi keputusan tersebut terkait dengan perempuan, karena perempuan yang memahami kebutuhan dan keinginan perempuan. Mereka menyadari kehadiran mereka dalam parlemen mampu berbuat sesuatu yang lebih berarti bagi kaumnya di Dapil dan bagi penduduk Aceh keseluruhan.

Kesadaran pada anggota legislatif perempuan juga muncul untuk hadir di ruang public, karena mereka ingin mewakili suara anak muda (kaum milenial) pada waktu itu sehingga bergabung dalam partai politik.

Temuan lapangan juga menemukan bahwa keterlibatan perempuan sebagai legislator sebagai cara untuk mengeksplorasi diri mereka, mengembangkan diri atau mengaktualisasi diri mereka di ruang publik. Temuan selanjutnya motivasi internal yang kemudian mendorong anggota legislatif perempuan untuk terjun ke dalam ruang publik karena pengalaman organisasi. Pengalaman dalam organisasi yang mereka geluti baik dimasa lalu maupun sekarang, latar belakang organisasi yang mereka tekuni baik formil dan nonformal (organisasi bisnis, social ataupun politik misalnya), pengalaman dalam organisasi ini menjadi cikal bakal dan menginisiasi keikutsertaan mereka di ranah politik.

Pengalaman organisasi dalam partai politik menjadi dorongan kuat bagi legislator perempuan Aceh, sekaligus ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pengurus partai politik, karena masih rendahnya ketertarikan perempuan diluar partai politik terhadap ruang publik ini, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pengurus partai politik untuk tidak mengusung kadernya ini sebagai caleg. Gambar 1.1 dibawah ini, peneliti gambarkan motivasi Internal Anggota Legislatif perempuan Aceh dalam keikutsertaan mereka dalam ruang publik.

Gambar 1.1 Motivasi Internal menjadi Anggota Legislatif



Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam motivasi internal, timbulnya rasa empati pada diri informan karena munculnya berbagai persoalan-persoalan sosial ditengah masyarakat, adanya kesadaran bahwa informan memiliki pengalaman politik sebelumnya dan pengalaman berorganisasi pada waktu lalu, serta keinginan untuk mengaktualisasi dirinya.

Berdasarkan data lapangan ditemukan selain motivasi internal anggota legislatif perempuan, nyatanya ada motivasi eksternal juga tidak kalah kuat mendorong anggota legislatif perempuan untuk mengikuti kontestasi sebagai legislator di parlemen

Aceh untuk tingkat propinsi ini pada periode 2014-2019.

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa motivasi eksternal yang menggerakkan anggota legislatif perempuan untuk hadir dalam ruang publik itu, peneliti mengkategorisasikannya sebagai berikut; motivasi keluarga, motivasi sosial, motivasi Agama, motivasi politik dan motivasi Ekonomi.

Masing-masing motivasi eksternal ini menguatkan langkah dari calon legislative perempuan dalam memilih jalur ini.

Di bawah ini gambar 1.2 merupakan ilustrasi motivasi eksternal menjadi legislator perempuan :

Gambar 1.2 Motivasi Eksternal Menjadi Anggota Legislatif



Sumber: hasil penelitian, 2019

Gambar 1.2 di atas memberikan gambaran mengenai hasil temuan penelitian terkait dengan motivasi eksternal pada anggota legislatif perempuan dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk periode 2014-2019, berikut ini;

Motivasi Keluarga; motivasi pada diri anggota legislatif perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ruang publik karena didorong kuat keluarga (suami, anak-anak dan orang tua), teman, kerabat.

Kelompok ini menjadi spirit kuat bagi legislator perempuan untuk melangkah dalam ruang publik. Komunikasi yang intens dengan keluarga, support, spirit, membuka cakrawala dan pandangan bagi perempuan-perempuan ini untuk ikut dalam kontestasi ini.

Motivasi kuat dari orang terdekat telah meningkatkan kepercayaan diri legislator perempuan dalam memilih jalur ini, karena selama ini politik diidentikkan dengan dunianya laki-laki dan perempuan di nomorduakan.

Laki-laki yang paling berhak menggeluti bidang ini dan juga diperkuat peran media, hasil penelitian yang dilakukan Gidengil dan Everitt (1999) bahwa “politik biasanya dianggap dunia laki-laki dan terus digambarkan demikian oleh pihak media” (Semetko A. Holli, 2016).

Dukungan penuh keluarga membuat mereka memiliki kepercayaan yang lebih tinggi untuk berkiprah di ruang publik, karena disadari memang menjadi anggota legislatif bukanlah sesuatu yang mudah, membutuhkan tenaga, pemikiran dan waktu yang tidak sedikit.

Sebagai seorang perempuan pastinya informan menyadari bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, sehingga ketika mereka terjun dalam politik maka diperlukan laki-laki untuk mendukungnya. Perempuan cenderung menilai laki-laki lebih unggul dalam bidang politik. Nilai-nilai paternalistik sangat kental di dalamnya, karena sejak kecil masyarakat kita sudah ditanamkan nilai-nilai paternalistik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi kuat legislator perempuan untuk terjun dalam dunia politik berasal dari keluarga terdekat terutama suaminya, maka ketika suaminya mendukung dan mensupport informan dengan kuatnya akan menimbulkan

kepercayaan diri yang tinggi pada diri legislator tersebut. Motivasi keluarga yang mendorong caleg perempuan untuk berpartisipasi dalam politik juga dikarenakan ingin mencari kesibukan positif.

Motivasi ini yang kemudian membuat informan menggali kemampuan diri (kompetensi komunikasi) mereka melalui peningkatan pengetahuan dan *skill*.

Berdasarkan dokumentasi pada Sekretariat DPRA didapati latar belakang profesi mereka sebelum menjadi anggota legislative adalah sebagai pengusaha, dosen/guru, ibu rumah tangga.

Waktu luang banyak, ketertarikan mereka yang kuat dalam politik dan dukungan penuh keluarga, sehingga membuka pintu bagi anggota legislatif perempuan untuk hadir dalam politik.

Motivasi sosial artinya bahwa motivasi yang timbul pada diri anggota legislatif perempuan ini karena melihat persoalan-persoalan sosial di masyarakat dan keinginan untuk berbuat sesuatu bagi lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapati bahwa keinginan anggota legislatif perempuan untuk mencalonkan diri dan terjun dalam politik karena:

- 1) keinginan untuk berbuat bagi masyarakat banyak dan luas.
- 2) Bentuk tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat.
- 3) bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Tuntutan hati nurani karena begitu banyak persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat Aceh sekarang.
- 5) Ingin mengangkat harkat martabat perempuan yang ada di desa-desa.
- 6) Mewakili suara perempuan dan rakyat yang ada di dapilnya.
- 7) Berkontribusi banyak demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat dan dengan jenis kelamin mayoritas dalam masyarakat Aceh yang kemudian menggugah sisi sosialnya sebagai manusia untuk berkontribusi lebih bagi masyarakat di Dapilnya dan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan, realitas sosial yang berkembang di masyarakat terutama mengenai masalah dan perilaku sosial memberikan mereka makna dan stimulus bagi

mereka untuk mengambil bagian lahirnya kebijakan yang memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat Aceh.

Motivasi Agama, temuan lain yang didapatkan dari hasil penelitian ini, bagi calon legislatif perempuan motivasi agama menjadi salah satu dorongan baginya untuk terjun dalam politik, keinginan dari informan untuk “berdakwah dalam politik”.

Mereka menginginkan bahwa pekerjaannya sebagai wakil rakyat menjadi media untuk syiar agama, sehingga pada saat mereka menjadi anggota legislatif maka menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan pesan-pesan (syiar-syiar Keislam) dan melakukan sesuatu untuk kepentingan agama Islam.

Dukungan ulama menjadi kekuatan kuat dan amunisi bagi calon legislatif perempuan untuk terlibat aktif dalam kontestasi ini, komunikasi yang berkesinambungan dengan tokoh agama membuka jalan bagi perempuan ini untuk hadir sebagai anggota legislator.

Dua penafsiran berbeda terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen, bagi sebagian ulama beranggapan bahwa manakala perempuan menjadi legislator, berarti seseorang menjadi pemimpin, dan tidak dibenarkan dalam Islam perempuan menjadi pemimpin, sehingga tidak adanya dukungan ulama ini kepada calon perempuan yang mengikuti kontestasi pileg pada periode 2014-2019.

Berbeda bagi sebagian ulama lain, mereka mempersepsikan bahwa menjadi legislator adalah menjadi wakil rakyat (bukan pemimpin) sehingga tidak ada pertentangan kepada perempuan yang mengikuti pemilihan legislatif.

Pemahaman yang berbeda ini menjadi kekuatan tersendiri bagi calon legislatif untuk mengikuti kontestasi.

Bagi masyarakat Aceh suara ulama adalah suara Tuhan artinya apa yang disampaikan oleh Ulama akan dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat Aceh, sehingga posisi Ulama bagi masyarakat Aceh sangat penting, tokoh Ulama menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang ketauhidan, fiqh, akhlak, muamalah dan persoalan masyarakat lainnya dan tidak terkecuali mengenai politik, semuanya didiskusikan.

Masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Ulama. Misalnya dalam hal pemilihan legislatif, bagi masyarakat Aceh terutama yang di desa/kampung akan senantiasa bertanya mengenai siapa caleg yang patut untuk dipilih dalam kontestasi pileg, biasanya tokoh Ulama ini akan memberikan penjelasan plus dan minus dari masing-masing caleg tersebut dan memberikan simbol-simbol tersendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat siapa yang layak atau tidak untuk dipilih. Realitas-realitas inilah yang membuat seorang caleg harus senantiasa berkomunikasi secara intens dan memiliki kedekatan yang baik dengan Ulama, karena ini akan memberikan pengaruh positif baginya dalam bursa kontestasi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) menyampaikan bahwa ulama memiliki dua persepsi yang berbeda mengenai kehadiran perempuan dalam politik. Sebahagian Ulama (Teungku) memperbolehkan adanya keterlibatan perempuan dalam politik, namun para perempuan-perempuan yang terlibat dalam politik, harus tetap menjaga identitas diri mereka sebagai Muslimah. Namun sebahagian Ulama yang lain menolak keterlibatan perempuan dalam politik, karena diyakini bahwa mereka akan menemukan berbagai hambatan nantinya dan para Ulama ini berpersepsi bahwa perempuan tidak akan tegas memimpin. Disamping penafsiran yang berbeda mengenai Alquran dan Hadist. ada Sebahagian Ulama kurang memahami tentang politik. Peneliti melihat bahwa ulama menjadi tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh, mereka tempat bertanya dalam segala hal mengenai sesuatu yang terkait dengan *Hablummina Allah* dan *Hablum Minannas*.

Agama dan dakwah menjadi sebuah dorongan yang kuat bagi informan untuk hadir dan berkiprah dalam politik disamping untuk menjaga amanat yang diberikan rakyat kepada dirinya.

Motivasi Politik, data lapangan menyatakan bahwa dorongan calon legislatif perempuan untuk mengikuti kontestasi ini karena adanya aturan yang mewajibkan 30% kehadiran calon legislatif perempuan pada masing-masing partai.

Dengan kondisi tersebut memaksa partai politik harus mengikuti itu karena sistem pemilu yang mensyaratkan demikian,

sehingga ketika informan menjadi pengurus atau bagian dari partai politik, maka ini menjadi tanggung jawab dia untuk mencalonkan diri atau dicalonkan partainya.

Namun ada juga partai karena ketidakadaan calon legislatif perempuan di partainya, sehingga mereka meminang calon legislatif perempuan diluar dari pengurus partai untuk memenuhi syarat ini.

Hasil statistic Uni Antar Parlemen (*Inter Parliamentary Union, IPU*) yang menyebutkan bahwa: “perempuan di seluruh dunia masih tertinggal jauh dari laki-laki dalam hal jabatan politik dan menguasai secara global, kurang dari 20% kursi di majelis rendah” Susan A. Banducci, Elisabeth Gidengil dan Jianna Everitt, 2016 (Semetko A. Holli, 2016).

Padahal kehadiran perempuan dalam parlemen akan membawa perubahan pada institusi atau Lembaga yang didominasi laki-laki ini. Sebagaimana diutarakan oleh (Yunita Kurniaty et al., 2016) bahwa dapat dibayangkan ketika minim dan tidak adanya perempuan yang hadir dalam politik, maka kebijakan dan keputusan yang diputuskan bersifat paternalistic dengan tidak mempertimbangkan pada perempuan sebagai pelaksana keputusan tersebut.

Motivasi politik menjadi legalitas bagi anggota legislatif perempuan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, sehingga tergerak hati informan mengikuti kontestasi ini karena informan menpersepsikan bahwa dengan adanya legitimasi kekuasaan pada dirinya sebagai wakil rakyat, maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dengan kekuasaan yang dimiliki akan membuat mereka lebih mudah untuk melakukan komunikasi politik dengan semua elemen masyarakat, sehingga harapannya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada pihak yang lemah (perempuan, anak dan kaum marjinal).

Motivasi Ekonomi, memang tidak mudah untuk menggali motivasi ini, namun peneliti melihat dari latar belakang informan sebelum menjadi anggota legislatif itu ada yang pengusaha, “ibu pejabat”.

Latar belakang pengusaha yang karena konflik di Aceh pada saat itu membuat informan banting stir dan terlibat aktif dalam organisasi kepartaian dan akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Kemudian informan yang lain, semula mereka hanya sebagai Ibu rumah tangga yang aktivitasnya mendamping tugas suami karena suami adalah pejabat di daerahnya, kemudian karena adanya proses interaksi dan komunikasi yang lain, menimbulkan ketertarikan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam politik.

Berdasarkan hasil lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota legislatif perempuan bahwa memang mereka tidak secara mudah mengungkapkan keinginan mereka untuk ikut aktif dalam pencalonan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka lebih pada keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan pada ujungnya akan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka serta adanya kepuasan bathin pada mereka. Selain itu menjadi anggota legislatif, juga menjadi sarana hiburan, artinya bahwa pada saat kunjungan kerja, mereka bisa memanfaatkan momen tersebut untuk refreshing, bertemu, berinteraksi dengan banyak orang di wilayah yang lain. Bekerja sambil refresing.

Beberapa temuan dari hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa hasrat perempuan Aceh untuk hadir dalam ruang politik dikarenakan karena memang keinginan murni dari dirinya, kesadaran pada dirinya terhadap persoalan-persoalan sosial di sekitarnya.

Kemudian mereka merasa pentingnya perempuan hadir dalam ruang publik karena yang mengetahui kebutuhan dan keinginan perempuan yaitu perempuan itu sendiri disamping motivasi-motivasi lain yang telah diuraikan diatas.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa legislator perempuan masih sangat minim dalam parlemen ini, atau tidak mencapai kuota yang ada, ada berbagai hambatan yang menyebabkan persoalan ini terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Mardhiah, Ainol, et al 2019) *The role of Acehnese women in the public sphere is still very low, due to various problems that prevent women from actively participating in in politic, even though opportunities have been widely opened for women to be present in the public sphere.* bahwa kehadiran perempuan dalam ruang publik masih sangat rendah, banyak persoalan yang menjadi kendala dan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

politik di Aceh. Meskipun kesempatan dan peluang telah dibuka luas, namun tidak membuat itu mudah bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aktifis perempuan dan penggiat hak azasi manusia Aceh menyampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa perempuan Aceh tidak mampu berperan aktif dalam politik, persoalan kapasitas perempuan, money politik, peran sistem yang tidak mendukung dan persoalan pada partai politik. Faktor intern pada diri perempuan itu sendiri, karena mereka tidak punya kapasitas dan kompetensi komunikasi.

Kemudian money politik yang ternyata menjadi tantangan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, selanjutnya persoalan sistem, sistem sosial, budaya ikut mewarnai kiprah politik perempuan di Aceh.

Budaya patriarki dan penafsiran agama yang dipahami berbeda di tengah masyarakat terhadap legislator perempuan, sistem pada partai politik yang tidak berpihak kepada perempuan, tidak adanya *affirmative action* dari partai yang mendukung dalam proses kampanye untuk kemenangan calon perempuan, tidak ada partai politik yang secara serius berkeinginan untuk memenangkan perempuan, tidak ada komitmen dari partai untuk memenangkan perempuan.

Banyak persoalan lain juga memberikan sumbangsih terhadap minimnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, namun ini tidak menjadi kajian dari tulisan ini.

Beberapa hasil penelitian lain menyebutkan ada beberapa motivasi eksternal yang mendorong mereka untuk ikut dalam kontestasi ini.

Penelitian (Yohana, 2016) mengatakan bahwa motivasi yang mendorong ketertarikan seseorang dalam politik adalah karena dorongan Keluarga, diusung Partai, Jiwa aktivis dan keinginan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan (Ismiati & Hidayati, 2017) bahwasanya motivasi caleg perempuan untuk hadir sebagai anggota legislatif karena *Need for power*, *need of affiliation* dan *need of achievement* yaitu

kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan (pribadi dan sosial), kebutuhan, *need of affiliation*; kebutuhan untuk membangun kerjasama, *need of achievement*, motivasi mendapatkan prestasi.

Motivasi agama dan dakwah adalah motivasi penting yang mendorong keikutsertaan caleg legislator perempuan (informan) dalam pemilihan legislatif.

Sesuatu yang tidak mengherankan terjadi karena Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan Syariat Islam, Aceh diberikan hak untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Syariat Islam, seperti tertera dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006, legalitas yang diberikan negara membuat seluruh sendi kehidupan sosial politik budaya masyarakat Aceh terkandung nilai-nilai keislaman.

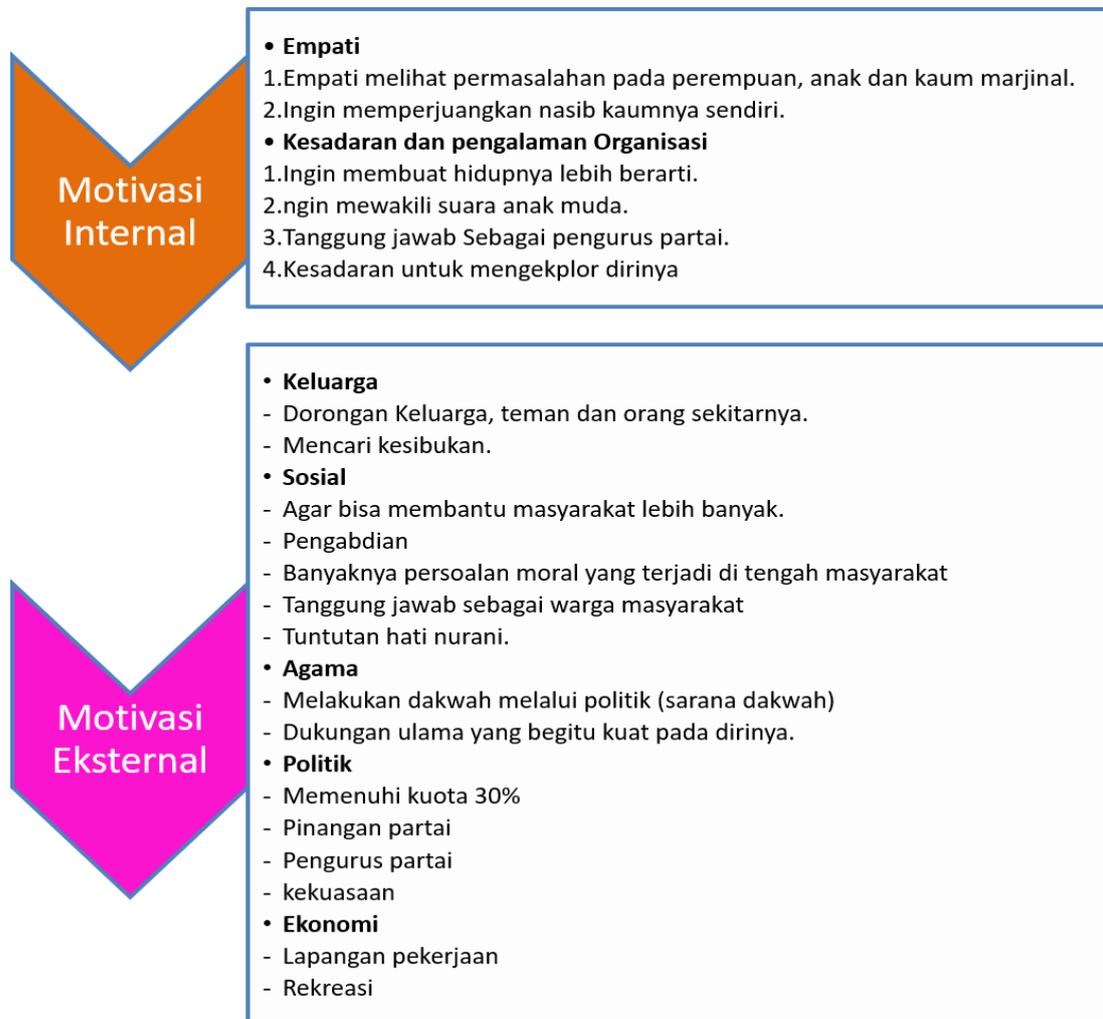
Bahkan jauh sebelum lahirnya UUPA ini, pada tahun 1959, Aceh menjadi sebuah propinsi di Indonesia yang diberikan sebutan sebagai Daerah Istimewa, karena Aceh memiliki keistimewaan dalam Agama, Pendidikan dan adat istiadatnya.

Hal ini mungkin tidak terjadi di daerah yang lain di Indonesia.

Nilai-nilai religiusitas dan agama tercermin dari masyarakat Aceh dalam kehidupannya sehari-hari, sebagaimana disampaikan oleh Clifford Geertz yang dikutip (Rifa'i, 2016) mengemukakan bahwa pondasi bagi perilaku manusia (*pattern for behaviour*) adalah agama, tindakan manusia berdasarkan ajaran agama. Kedua, perilaku manusia (*pattern of behaviour*) berdasarkan pada pola kepercayaannya. Agama hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia, agama sebagai pola yang mengarahkan perilaku manusia.

Pemaparan Geertz di atas memberikan gambaran bahwa dorongan agama dan dakwah itu hadir karena cerminan dan proses internalisasi pada diri informan mengenai nilai-nilai keislaman yang diadopsinya sebagai tuntunan ketika mereka hadir dalam ruang politik, nilai keislaman ini menjadi dasar dan pola perilakunya dalam kehidupan politiknya sebagai wakil rakyat. Di bawah ini peneliti coba rangkum dalam gambar 1.3 mengenai motivasi dari legislator perempuan untuk terjun dalam dunia politik, internal dan eksternalnya.

Gambar 1.3 Motivasi Anggota Legislatif Perempuan Internal dan Eksternal



Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Dari pemaparan diatas mengenai motivasi anggota legislatif perempuan Aceh menjadi legislator adalah motivasi internal dan eksternal yang menggugah mereka hadir dan memilih menjadi wakil rakyat.

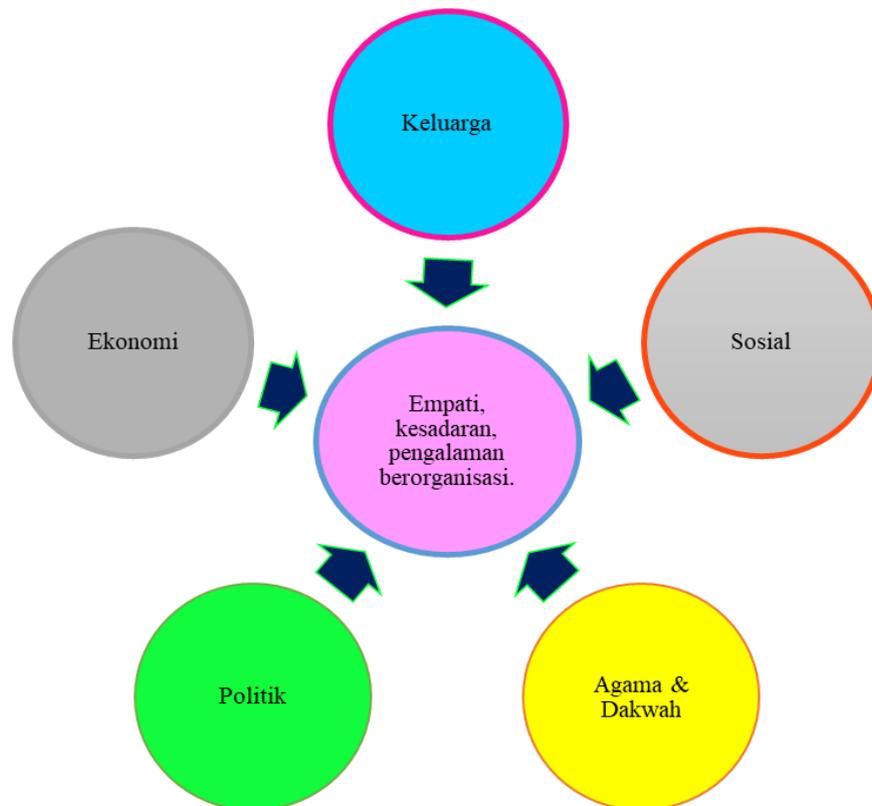
Berdasarkan temuan lapangan, Peneliti menemukan bahwa motivasi eksternal yang membuat lahirnya motivasi internal pada diri mereka atau dengan kata lain bahwa dorongan dari luar yang mengakibatkan munculnya dorongan dari dalam informan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Komunikasi dengan keluarga, teman dan lingkungan sekitar, ditambah banyaknya persoalan-persoalan sosial dan masalah yang terjadi di dalam masyarakat Aceh, permasalahan sosial yang terjadi pada remaja,

perempuan, anak dan kaum marjinal yang menggugah keinginan mereka untuk ikut dalam kontestasi ini. Ditambah juga dorongan untuk berdakwah dalam politik, mengkomunikasikan tentang ajaran-ajaran keislaman dalam ruang politik ini serta dukungan ulama disekitar informan. Selanjutnya motivasi politik (sistem *affirmative action*, pinangan partai politik dan ekonomi telah mempengaruhi dirinya untuk hadir dalam ruang publik ini.

Berbagai stimulus dari eksternal yang kemudian terinternalisasi pada diri mereka, yang kemudian timbul keinginan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Stimulus-stimulus ini telah menggugah rasa empati, menggugah hati nurani dan kesadaran pada diri pada informan untuk memilih jalur

Gambar 1.4 Internalisasi Motivasi Internal dan Eksternal



Sumber: Hasil penelitian, 2019

ini dan ini juga sebagai bentuk aktualisasi diri mereka. Peneliti melihat motivasi eksternal yang telah menginternalisasikan menggugah kesadaran internal mereka untuk mengambil jalan ini. Peneliti akan menggambarkan mengenai motivasi eksternal yang menyetuk kesadaran internal pada diri legislator perempuan, jadi motivasi internal itu muncul tidak murni karena dorongan dari dalam dirinya, namun justru motivasi internal itu muncul karena motivasi internal. Sebagaimana dalam Gambar 1. 4 di atas.

SIMPULAN

Motivasi anggota legislator perempuan ikut terjun dalam politik sangat beragam yang terdiri dari motivasi internal (berasal dari dalam dirinya) dan motivasi eksternal (karena dorongan dari luar dirinya)

Motivasi internal adalah motivasi yang muncul pada diri legislator perempuan itu sendiri karena rasa empatinya terhadap persoalan perempuan, anak-anak dan kaum marjinal, kemudian kesadaran yang muncul

karena banyaknya persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh.

Motivasi eksternal muncul karena dorongan yang kuat dan komunikasi yang intens dengan keluarga terdekatnya. Banyaknya persoalan-persoalan sosial juga ikut menggugah motivasi sosial legislator perempuan. Motivasi agama keinginan berdakwah dan mengkomunikasikan syiar Islam dalam politik, motivasi politik (memenuhi kuota perempuan di parlemen dan untuk menampung aspirasi perempuan) dan motivasi ekonomi (lapangan pekerjaan dan tamasya gratis). Keterlibatan legislator perempuan di ruang publik sebagai bentuk eksplorasi, pengembangan dan aktualisasi diri mereka. Motivasi keluarga dan motivasi sosial menjadi motivasi kuat dari kehadiran legislator perempuan Aceh, karena jika tanpa dukungan keluarga terutama suami, maka dipastikan mereka tidak akan ikut dalam konstestasi ini, juga karena begitu banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Aceh membuat legislator perempuan harus bekerja dan

melakukan komunikasi yang intens dalam parlemen dan dengan stakeholder yang lain untuk melahirkan kebijakan dan keputusan politik terait dengan ini.

Kebijakan *affirmative action* yang dibuat pemerintah sebagai upaya meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik, sekaligus perempuan harus memiliki kompetensi dirinya, seperti kompetensi komunikasi, memiliki jaringan komunikasi yang baik dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan politik sejak dini kepada perempuan-perempuan Aceh, sehingga perempuan Aceh memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam politik dan secara kuantitas juga banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative & quantitative approaches*. Sage Publications.
- Devi, santi. (2015). TINJAUAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014. *Dk*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hasni, K. (2015). Perjalanan Panjang Perempuan Dalam Budaya. *Jurnal Perempuan*.
- Hidayati, S., Rachmatan, R., & Aprilia, E. D. (2016). MOTIVASI CALEG PEREMPUAN DITINJAU DARI ASAL PARTAI POLITIK. 07(02), 1–14.
- Hutapea, E. (2016). IDENTIFIKASI DIRI MELALUI SIMBOL-SIMBOL KOMUNIKASI (Studi Interaksionisme Simbolik Komunitas Pemakai Narkoba Di DKI Jakarta). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–14.
- Indah Mariani, L. M., & Sariyathi, N. (2017). Pengaruh Motivasi, Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Warung Mina Peguyangan Di Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(7), 244999.
- Ismiati, & Hidayati, S. H. S. (2017). Motivasi calon legislatif (caleg) untuk mencalonkan diri pada pemilu ditinjau dari jenis kelamin. *Journal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6(1), 52–70.
- Madekhan, M. (2019). Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Reforma*, 7(2), 62. <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>
- Mardhiah, Ainol, dadang rahmat Hidayat, Agus Rahmat, N. A. S. (2019). Political Communication of Women's Aceh Legislators (Opportunities and Challenges of Women in Aceh in The Public Sphere). *Journal of Philosophy and Practice*, 12(2).
- Mikail, K. (2015). POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. *Addin*, 9(2), 253–276. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>
- Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. *Wahana*, 1, No.10(10), 77–85. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/654>
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron. In *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* (Vol. 5, Issue 02, p. 195). <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02.1888>
- Putri, R. E. (2015). KOMUNIKASI POLITIK (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). *Jurisprudence*, 5(1), 50–63.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Bandung., PT. Remaja Rosdakarya. (30th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Rifa'i, M. K. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Berbasis Multikultural Dalam Membentuk Insan Kamil. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 116. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.116-133>
- Riswandi. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, D. P. (2016). Persepsi Ulama tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan. *Al-Lubb*, 1, 114–133.
- Semetko A. Holli, M. S. (2016). *Handbook Komunikasi Politik*. Nusa Media.
- Silfiasari, S. P. (2018). Empati Dan Pemaafan Dalam Hubungan Pertemanan Siswa Reguler Kepada Siswa Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Sekolah Inklusif.

- Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Widiarti, P. W. (2017). Konsep Diri (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Pendampingan Pada Siswa Smp Se Kota Yogyakarta. *Informasi*, 47(1), 135.
<https://doi.org/10.21831/informasi.v47i1.15035>
- Yohana, nova. (2016). (Studi Fenomenologi pada Anggota Dewan Perempuan DPRD MOTIF DAN MAKNA PEREMPUAN. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 71–82.
- Yunita Kurniaty, E., Hidayat, B., Efendy, S., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 3(2), 166–177.
<http://ojs.lkispol.or.id/index.php/governance/article/view/82>